

ABSTRAK

Skripsi dengan judul “Analisis Tata Kelola Program Kartu Pra-kerja Perspektif Perpres Nomor 76 Tahun 2020 Tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Pra-kerja dan *Fiqih Siyasah Dusturiyah* (Studi Pemberitaan Media Massa *Online* Pada Tahun 2020)” ini ditulis oleh Kiki Helfia Jafanisa, NIM. 12103183098, Jurusan Hukum Tata Negara (HTN), Institut Agama Islam Negeri Tulungagung, 2021, dibimbing oleh Dr. Kutbuddin Aibak, S.Ag.,M.H.I.

Kata Kunci: Tata Kelola, Program Kartu Pra-kerja, Perpres Nomor 76 Tahun 2020, *Fiqih Siyasah Dusturiyah*, Media Massa *Online*

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh percepatan peluncuran Program Kartu Pra-kerja pada 11 April 2020 yang pada rancangannya didesain sebagai program pelatihan kompetensi untuk meningkatkan kualitas maupun memberikan keterampilan (*skill*) bagi para pesertanya. Sehingga mereka mampu bersaing dalam memperoleh lapangan kerja. Namun, pada akhirnya Program Kartu Pra-kerja ini ditambahkan dengan skema bantuan sosial (*bansos*) untuk meminimalisir pengurangan tingkat kesejahteraan masyarakat akibat pandemi COVID-19 yang belum tercakup kedalam skema *bansos* reguler. Dengan tujuan ganda ini serta persiapan yang kurang matang menyebabkan Program Kartu Pra-kerja memiliki berbagai permasalahan terkait tata kelolanya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2020 Tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui program Kartu Pra-kerja.

Fokus penelitian ini tentang tata kelola Program Kartu Pra-kerja. Dengan pertanyaan penelitian sebagai berikut: 1) Bagaimanakah tata kelola Program Kartu Pra-kerja berdasarkan pemberitaan media massa *online* pada tahun 2020. 2) Bagaimanakah tata kelola Program Kartu Pra-kerja berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2020 Tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Pra-kerja. 3) Bagaimanakah tata kelola Program Kartu Pra-kerja berdasarkan tinjauan *Fiqih Siyasah Dusturiyah*.

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah: 1) Menganalisis tata kelola Program Kartu Pra-kerja berdasarkan pemberitaan media massa *online* pada tahun 2020. 2) Menganalisis tata kelola Program Kartu Pra-kerja berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2020 Tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Pra-kerja. 3) Menganalisis tata kelola Program Kartu Pra-kerja berdasarkan tinjauan *Fiqih Siyasah Dusturiyah*.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif analitis. Penelitian ini menggunakan sumber data sekunder yang menggunakan metode pengumpulan data secara dokumentasi. Analisis data yang digunakan yaitu analisis deskriptif (*analysis descriptive*) dan analisis isi (*content analysis*) dengan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan

pendekatan kasus (*case approach*) yang diperoleh melalui media massa *online* pada tahun 2020.

Hasil penelitian Analisis Tata Kelola Kelola Program Kartu Pra-kerja Perspektif Perpres Nomor 76 Tahun 2021 Tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Pra-kerja dan *Fiqih Siyasa Dusturiyah* (Studi Pemberitaan Media Massa *Online* Pada Tahun 2020) adalah: 1) Tata kelola Program Kartu Pra-kerja berdasarkan pemberitaan media massa *online* pada tahun 2020 memiliki sisi positif dan negatif. Namun, meskipun demikian program ini terus berupaya untuk meningkatkan performanya dari gelombang ke gelombang dengan tujuan agar dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat dan memberikan manfaat pelatihan kerja. 2) Tata Kelola Program Kartu Pra-kerja berdasarkan Perpres Nomor 76 Tahun 2020 Tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Pra-kerja sudah sesuai. Dimana pelaksanaannya sudah sejalan dengan peraturan yang berlaku. Artinya tidak ada penyimpangan antara pelaksanaannya dengan Perpres tersebut. 3) Pelaksanaan Program Kartu Pra-kerja sebagai program peningkatan kompetensi sekaligus penyaluran bansos dimasa pandemi bagi pesertanya sudah sesuai dengan pandangan *Fiqih Siyasa Dusturiyah*. Dimana segala peraturan yang diterbitkan oleh pemerintah didasarkan atas tujuan masalah. Islam menginginkan kesejahteraan bagi seluruh makhluk Allah di muka bumi ini. Salah satu tugas pemerintah Islam dalam mencapai tujuan tersebut yaitu mensejahterakan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pokok hidup mereka dan minimal negara harus dapat memenuhi kebutuhan asasi masyarakat salah satunya terkait peningkatan kemampuan diri.

ABSTRACT

Thesis with the title "Analysis of the Pre-employment Card Program Governance Perpres Perpres No. 76 of 2020 Concerning the Development of Work Competencies Through the Pre-employment Card Program and *Fiqh Siyasah Duturiyah* (Online Mass Media Coverage Study in 2020)" was written by Kiki Helfia Jafanisa, NIM. 12103183098, Department of Constitutional Law (HTN), Tulungagung State Islamic Institute, 2021, supervised by Dr. Kutbuddin Aibak, S.Ag., M.H.I.

Keywords: Governance, Pre-employment Card Program, Presidential Regulation Number 76 of 2020, *Fiqh Siyasah Duturiyah*, Online Mass Media

This research was motivated by the acceleration of the launch of the Pre-employment Card Program on April 11, 2020, which was designed as a competency training program to improve quality and provide skills for its participants. So that they can compete in obtaining employment. However, in the end, the Pre-employment Card Program was added to a social assistance scheme (bansos) to minimize the reduction in the level of community welfare due to the COVID-19 pandemic which had not been covered by the regular social assistance scheme. With this dual purpose and inadequate preparation, the Pre-Employment Card Program has various problems related to its governance as stated in Presidential Regulation Number 76 of 2020 concerning the Development of Work Competencies through the Pre-Employment Card program.

The focus of this research is on the governance of the Pre-employment Card Program. With research questions as follows: 1) How is the governance of the Pre-Employment Card Program based on online mass media coverage in 2020. 2) How is the governance of the Pre-Employment Card Program according the Presidential Regulation Number 76 of 2020 concerning Development of Work Competencies through the Pre-Employment Card Program. 3) How is the management of the Pre-Employment Card Program according the *Fiqh Siyasah Duturiyah*.

The objectives of this research are: 1) Analyzing the governance of the Pre-Employment Card Program based on online mass media coverage in 2020. 2) Analyzing the governance of the Pre-Employment Card Program according the Presidential Regulation No. 76 of 2020 concerning Development of Work Competencies through the Pre-employment Card Program. 3) Analyzing the governance of the Pre-employment Card Program according the *Fiqh Siyasah Duturiyah*.

The research uses normative legal research method with analytical descriptive nature. This study uses secondary data sources that use the collecting data method by documentation. The data analysis used is descriptive analysis and content analysis with a statutory approach and a case approach obtained through online mass media in 2020.

The results of the research on Governance Analysis of the Pre-employment Card Program Perpres Perpres No. 76 of 2021 concerning the Development of Work Competencies Through the Pre-employment Card Program and *Fiqh Siyasah Duturiyah* (Online Mass Media Reporting Study in 2020) are: 1) Management of the Pre-Employment Card Program -Work based on online mass media coverage in 2020 has both positive and negative sides. However, even so, this program continues to strive to improve its performance from wave to wave with the aim of reaching all levels of society and providing job training benefits. 2) The management of the Pre-employment Card Program based on Presidential Decree No. 76 of 2020 concerning the Development of Work Competencies through the Pre-employment Card Program is appropriate. Where the implementation is in line with the applicable regulations. This means that there is no deviation between its implementation and the Presidential Regulation. 3) The implementation of the Pre-employment Card Program as a competency improvement program as well as the distribution of social assistance during the pandemic for its participants is in accordance with the views of *Fiqh Siyasah Duturiyah*. Where all regulations issued by the government are based on the purpose of *maslahah*. Islam wants prosperity for all of Allah's creatures on this earth. One of the tasks of the Islamic government in achieving this goal is to prosper the community to meet their basic needs of life and at least the state must be able to meet the basic needs of the community, one of which is related to self-improvement.

الملخص

البحث الجامعي بعنوان "تحليل حوكمة برنامج بطاقة ما قبل التوظيف فرفرس رقم 76 لعام 2020 بشأن تطوير كفاءات العمل من خلال برنامج بطاقة ما قبل التوظيف و الفقه سيره الدتورية(دراسة التقارير الإعلامية عبر الإنترنت في 2020)" كتبها كيكي حلفي جفانسا، رقم 12103183098 قسم القانون الدستوري (HTN) ، جامعة السيد علي رحمة الله الإسلامية الاحكومية تولونج اجونج، 2021 ، بإشراف الدكتور. خدبود عيبا المحستر

الكلمات المفتاحية : الحوكمة ، برنامج بطاقة ما قبل التوظيف، قبل التوظيف فرفرس رقم 76 لعام 2020 ، فقه السياسة الدتورية، وسائل الاعلام على الانترنت

كان الدافع وراء هذا البحث هو تسريع إطلاق برنامج بطاقة ما قبل التوظيف في 11 أبريل 2020 والذي تم تصميمه كبرنامج تدريبي للكفاءات لتحسين الجودة وتوفير المهارات للمشاركين فيه. حتى يتمكنوا من التنافس في الحصول على عمل. ومع ذلك ، في النهاية ، تمت إضافة تنفيذ هذا البرنامج مع خطة المساعدة الاجتماعية (بنصص) لتقليل الانخفاض في مستوى رفاهية المجتمع بسبب جائحة جوفد-19 الذي لم يتم تضمينه في خطة المساعدة الاجتماعية العادية. مع هذا الغرض المزدوج والإعداد غير الكافي ، يواجه برنامج بطاقة ما قبل التوظيف مشاكل مختلفة تتعلق بإدارته كما هو مذكور في اللائحة الرئاسية رقم 76 لعام 2020 بشأن تطوير كفاءات العمل من خلال برنامج بطاقة ما قبل التوظيف.

تركز هذه الورقة على حوكمة برنامج بطاقة ما قبل التوظيف. مع الأسئلة البحثية على النحو التالي: (1) كيف تعتمد حوكمة برنامج بطاقة ما قبل التوظيف على التغطية الإعلامية عبر الإنترنت في عام 2020. (2) كيف يتم إدارة برنامج بطاقة ما قبل التوظيف على أساس اللائحة الرئاسية رقم 76 لعام 2020 بشأن تطوير كفاءات العمل من خلال برنامج بطاقة ما قبل التوظيف. (3) كيف يتم إدارة برنامج بطاقة ما قبل التوظيف على أساس مراجعة الفقه السياسة الدتورية

أهداف هذه الدراسة هي: (1) تحليل إدارة برنامج بطاقة ما قبل التوظيف بناءً على التغطية الإعلامية عبر الإنترنت في عام 2020. (2) تحليل إدارة برنامج بطاقة ما قبل التوظيف بناءً على اللائحة الرئاسية رقم 76 لعام 2020 بشأن تطوير كفاءات العمل من خلال برنامج بطاقة ما قبل التوظيف. (3) تحليل حوكمة برنامج بطاقة ما قبل التوظيف بناءً على مراجعة فقه السياسة دستورية.

طريقة البحث المستخدمة هي البحث القانوني المعياري ذو الطبيعة الوصفية التحليلية. تستخدم هذه الدراسة مصادر البيانات الثانوية التي تستخدم طرق جمع البيانات مع التوثيق. تحليل بيانات المستخدم هو تحليل وصفي وتحليل المحتوى مع نهج قانوني وقضية تم الحصول عليه من خلال وسائل الإعلام عبر الإنترنت في عام 2020.

نتائج تحليل تحليل الحوكمة للقرار الرئاسي رقم 76/2021 بشأن تطوير كفاءة العمل من خلال برنامج بطاقة ما قبل التوظيف وسياسة الفقه الدوترية (مراجعة التغطية الإعلامية عبر الإنترنت في عام 2020) هي: (1) إدارة التوظيف في برنامج بطاقة ما قبل التوظيف - العمل القائم على التغطية الإعلامية عبر الإنترنت لعام 2020 له جوانب إيجابية وسلبية. ومع ذلك ، يواصل هذا البرنامج تحسين أدائه من موجة إلى أخرى بهدف الوصول إلى جميع مستويات المجتمع وتقديم مزايا التدريب الوظيفي. (2) تعد إدارة برنامج بطاقة ما قبل التوظيف بناءً على المرسوم الرئاسي رقم 76 لسنة 2020 بشأن تطوير كفاءات العمل من خلال برنامج بطاقة ما قبل التوظيف مناسبة. عندما يكون التنفيذ متوافقاً مع اللوائح المعمول بها. وهذا يعني أنه لا يوجد أي انحراف بين تطبيقه وبين اللائحة الرئاسية. (3) تنفيذ برنامج بطاقة ما قبل التوظيف كبرنامج لزيادة الكفاءة وتوزيع المساعدة الاجتماعية أثناء الجائحة على المشاركين فيها بما يتوافق مع فقه الفقه السياسي للدوتري. حيث تكون جميع اللوائح الصادرة عن الحكومة مبنية على أساس الغرض من المصلحة. يريد الإسلام الرخاء لجميع مخلوقات الله على هذه الأرض. من مهام الحكومة الإسلامية في تحقيق هذا الهدف تحسين رفاهية المجتمع لتلبية احتياجاته الأساسية في الحياة وعلى الأقل يجب أن تكون الدولة قادرة على تلبية الاحتياجات الأساسية للمجتمع ، والتي ترتبط إحداها بالذات. -تطوير. .